

HEALTH SILK ROAD: STRATEGI CHINA MEWUJUDKAN AMBISI GEOPOLITIKNYA

Humphrey Wangke

Abstrak

Seiring berkembangnya globalisasi, kesehatan global telah menjadi agenda penting negara-negara di dunia. Wabah penyakit menular yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan penyebarannya yang lintas batas telah menjadi pertimbangan suatu negara dalam mengatur kerja sama internasional. Tulisan ini akan menganalisis secara ringkas apa yang ingin dicapai China melalui kebijakan Health Silk Road (HSR). Melalui HSR, China memfasilitasi penanganan pandemi Covid-19 di negara-negara yang mendukung Belt and Road Initiative (BRI). Bantuan kemanusiaan yang diberikan menjadi kekuatan soft power China untuk menarik simpati dan dukungan dari sebanyak mungkin negara di dunia dan secara perlahan menyingkirkan dominasi Amerika Serikat (AS). Bagi Indonesia, bantuan dari China sebaiknya menjadi pelengkap. Indonesia harus bisa mengusahakan kerja sama multilateral untuk menanggulangi Covid-19 mengingat penyebarannya yang lintas batas. Sebagai representasi rakyat, DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di dunia terutama dalam tukar menukar informasi dan penyediaan alat kesehatan untuk menangani pasien Covid-19.

Pendahuluan

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan visi geo-ekonomi yang paling ambisius dalam sejarah China modern karena melibatkan lebih dari 70 negara atau lebih dari dua pertiga populasi global. Negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa menjadi target utama China dalam merealisasikan inisiatif tersebut. Karenanya, China mengambil banyak langkah dalam mempromosikan BRI

dengan membangun jaringan perdagangan dan investasi yang luas. Dana hingga 40 miliar dolar AS disediakan sebagai modal awal kegiatan BRI melalui pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).

China memanfaatkan statusnya sebagai negara dagang terkemuka di dunia dalam mempromosikan BRI, sebaliknya BRI membantu meningkatkan kepentingannya dalam ekonomi dunia melalui perluasan



perdagangan dan investasi. Investasi China menyebar di mana-mana dan telah mengambil alih peran Amerika Serikat (AS). Hingga tahun 2000, AS masih menjadi mitra dagang utama lebih dari 80% negara di dunia. Namun pada 2018, jumlah itu turun menjadi 30%, sementara pada saat bersamaan China telah menjadi mitra dagang utama bagi 128 dari 190 negara di dunia. Dengan status barunya sebagai negara ekonomi utama di dunia, China mengembangkan BRI berdasarkan pendekatan *hub and spoke* dengan China sebagai *hub*-nya.

Salah satu bagian terpenting dari BRI adalah *Health Silk Road* (HSR) atau kerja sama kesehatan negara-negara anggota BRI. HSR telah direncanakan China pada periode tahun 2015-2017. Rencana ini sekarang dimatangkan dan diimplementasikan secara besar-besaran dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Sesuai pendekatan *hub and spoke*, HSR memperlihatkan dengan jelas bagaimana peran penting China dalam mengarahkan kerja sama kesehatan internasional di masa depan. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi mendorong China untuk meningkatkan perannya di dunia. China memperluas keterlibatan langsung dalam mengatasi pandemi Covid-19 agar tidak mengganggu strategi konektivitasnya melalui BRI. Tulisan ini menganalisis apa yang ingin dicapai China melalui kebijakan HSR.

HSR dan Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19, yang telah merusak sistem kesehatan

global, mulai dirasakan dampaknya terhadap perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat internasional. Mimpi China melalui BRI adalah memperkuat dan memperluas interaksi kerja sama, menciptakan jaringan terpadu berdasarkan ikatan ekonomi, sosial dan politik yang saling menguntungkan, menurunkan rasa saling tidak percaya, dan sebaliknya meningkatkan rasa aman. Melalui HSR, China ingin segera menghentikan pandemi Covid-19 bukan hanya di negara-negara BRI tetapi juga ke semua negara di dunia yang memerlukan bantuannya, termasuk ke WHO yang mendapat bantuan sebesar 20 juta dolar AS.

Ketika Covid-19 menyebar dan negara-negara di dunia tengah berusaha untuk mengatasinya, China telah menempatkan diri sebagai pemimpin dalam kesehatan masyarakat dunia. Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa ia membangun HSR sebagai bagian dari BRI. Bantuan China ke negara-negara Asia, Afrika, dan Eropa tidak terlepas dari keunggulan China dalam mengendalikan Covid-19.

Bantuan medis dan konsultasi secara bilateral yang disediakan pemerintah China sering kali disampaikan langsung oleh kedutaan China setempat, seperti di Malaysia, Filipina, dan Yunani. Dalam kasus lain, persediaan medis disediakan oleh perusahaan yang terlibat dalam proyek BRI di luar negeri, seperti Huawei atau *China Communications Construction Company*. Yayasan Jack Ma dan

Alibaba telah mengirimkan paket bantuan ke puluhan negara mulai dari Uganda dan Ukraina hingga AS. China juga telah memberikan dukungan ekonomi kepada beberapa negara yang menderita, termasuk pinjaman konsesi senilai 500 juta dolar AS ke Sri Lanka.

Selain itu, China telah memainkan peran koordinasi dalam berbagai forum multilateral untuk memperlihatkan respons China terhadap persoalan Covid-19. Lebih dari itu, Presiden Xi Jinping memberikan pidato pada pertemuan virtual para pemimpin G-20, perwakilan China telah terlibat diskusi dengan negara-negara ASEAN, mekanisme "17 + 1" dengan negara-negara UE, dan dengan negara-negara Uni Afrika yang sangat merasakan kepemimpinan China dalam mengatasi pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan tersebut pada hakekatnya merupakan bagian dari *soft power* yang dibangun China.

Ambisi Geopolitik China

China membangun *soft power* yang dibutuhkan untuk mengintensifkan persaingan dengan AS. Ketika Eropa menjadi pusat penyebaran virus, China meningkatkan bantuannya ke masing-masing pemerintah di sana. Suatu hal yang sangat tepat dilakukan karena pada saat bersamaan AS tengah berhadapan dengan ancaman virus yang sama. Hasilnya adalah pertempuran untuk merebut hati dan simpati masyarakat Eropa telah dimenangkan China, setidaknya untuk saat ini.

Setelah terbebas dari pandemi Covid-19, China memiliki ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengatasi penyakit itu sehingga berada dalam posisi menawarkan bantuan. Bantuan itu sangat dibutuhkan Eropa sehingga China secara sadar telah memanfaatkan *soft power* yang dimilikinya. Bagi China, bantuan ke negara-negara Eropa adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan peran kepemimpinan internasional setelah sebelumnya sibuk mencegah virus itu agar tidak menyebar melampaui perbatasannya.

Ketika Eropa menjadi pusat penyebaran Covid-19 (sebelum kemudian beralih ke AS), AS dan beberapa negara UE tidak saling membantu. Serbia dan Estonia adalah contoh kasus di mana ketidakpedulian UE untuk membantu mereka bertepatan dengan keinginan China memperluas jangkauannya ke masing-masing pemerintah di Eropa. China memiliki pengalaman dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara sehingga berada dalam posisi menguntungkan untuk memberikan bantuan (meskipun ada sejumlah negara Eropa yang juga mengkritik bantuan China karena dianggap rendah kualitasnya). Terlepas dari hal tersebut, dalam kondisi seperti itu, China telah menggunakan kekuatan *soft power*-nya untuk memengaruhi negara penerima.

Dengan melakukan hal itu, China telah melangkah ke peran yang pernah didominasi negara-negara Barat pada saat bencana

alam atau darurat kesehatan masyarakat yaitu keterlibatan secara global. Negara-negara UE jelas berada dalam kondisi yang lebih lemah pada krisis Covid-19. Sedangkan AS di bawah Donald Trump tengah sibuk dengan strategi yang lebih isolasionis seperti dengan menghentikan bantuan dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dianggapnya pro-China.

Jika perekonomian global mendapat pukulan besar karena persebaran Covid-19, maka dapat dipastikan bahwa negara yang memiliki kekuatan akan memiliki hak untuk menunjukkan kepemimpinannya. Kondisi demikian telah memberi peluang kepada China untuk mengambil peran politik yang lebih besar dalam tata pergaulan internasional. Pada tahap ini, negara-negara Barat mungkin bersedia menyerahkan beberapa posisi strategisnya kepada China di tingkat internasional untuk menyelamatkan stabilitas ekonomi global.

Seperti yang telah diperjuangkan dalam dua dekade terakhir, China menggunakan segala kekuatan yang dimilikinya untuk membangun kemitraan dengan sebanyak mungkin negara di dunia. Sejauh ini China mengandalkan perdagangan dan investasi untuk memperlihatkan superioritasnya, dan dalam kasus Covid-19, China berada pada posisi yang menguntungkan sebagai pembuat obat-obatan dan alat pelindung diri (APD) terbesar di dunia. Ekspansi kepemimpinan China yang signifikan melalui isu Covid-19 akan menjadi krisis

kepemimpinan global besar pertama karena tanpa adanya partisipasi AS. Ketika dunia dilanda wabah Ebola beberapa tahun lalu, AS masih memimpin perang melawan penyakit menular itu.

Sekarang, kegagalan global dalam menghadapi pandemi Covid-19 baik di Eropa maupun AS telah memberikan *platform* kepemimpinan China untuk membuktikan bahwa modelnya bekerja, dan berpotensi mendapatkan keuntungan geopolitik secara nyata. Bagaimanapun juga bantuan kesehatan yang dialirkan oleh China ke negara-negara di dunia telah mencerminkan ambisi geopolitik China dan juga masalah kemanusiaan. Masalah mendesak yang harus dilakukan oleh negara kuat adalah memberikan bantuan untuk menyelamatkan nyawa manusia, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh negara-negara UE maupun AS, setidaknya untuk saat ini.

Bagaimana Indonesia menyikapi kebijakan HSR China, khususnya terkait dengan penanggulangan Covid-19? Belum lupa dalam ingatan, bagaimana China mempermainkan kedaulatan Indonesia ketika mencuri ikan di ZEE Indonesia di Perairan Natuna Utara. Menghadapi pandemi Covid-19, langkah terbaik yang harus dilakukan Indonesia adalah mengusahakan sendiri berbagai kebutuhan untuk penanggulangan Covid-19. Bantuan yang diberikan hanya sebagai pelengkap agar Indonesia

terhindar dari ketergantungan dan tekanan China dalam bernegosiasi. Indonesia harus bisa mengusahakan kerja sama multilateral untuk menanggulangi Covid-19 mengingat penyebarannya yang lintas batas, yaitu pertama, dengan memanfaatkan WHO sebagai wadah kerja sama seluruh negara anggota PBB, dan kedua, dalam menyediakan peralatan medis yang esensial, APD, obat, dan vaksin.

Penutup

China menyadari wabah penyakit menular dan peningkatan mobilitas global telah meningkatkan tantangan terhadap keamanan kesehatan global. China memanfaatkan krisis Covid-19 untuk memperlihatkan kapasitas kepemimpinannya dalam menanggulangi penyebaran penyakit menular lintas batas. Mungkin masih terlalu dini untuk mengatakan semangat mengelola kesehatan dunia akan mengubah peran internasionalnya. Tetapi negara-negara UE dan AS tidak melakukan respons yang semestinya dalam menghadapi pandemi Covid-19 di tingkat global. Di sinilah China mempunyai banyak ruang untuk bermanuver dan mengambil peran. Sebagai representasi rakyat, DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di dunia terutama dalam tukar menukar informasi dan penyediaan alat kesehatan untuk menangani pasien Covid-19.

Referensi

- Cheng, Yang & Feng Cheng. "China's Unique Role in the Field of Global Health", *Global Health Journal*, Vol. 3, Issue 4, Desember 2019.
- Fallon, Theresa. "China, Italy, and Coronavirus: Geopolitics and Propaganda", *The Diplomat*, 20 Maret 2020.
- J, Chen, et al. "Combating Infectious Disease Epidemics through China's Belt and Road Initiative", *PLoS Negl Trop Dis* 13(4): 2019.
- Marsetio, "Covid-19 dan Hegemoni AS di LCS", *Kompas*, 13 April 2020, hal. 7.
- Rajagopalan, Rajeswari Pillai. "The Danger Of China's Maritime Aggression Amid Covid-19", *The Diplomats*, 10 April 2020.
- Septiari, Dian. "Indonesia Joins Multilateral Pursuit of "Practical" Coordinated Response to Covid-19", *The Jakarta Post*, 9 April 2020, hal. 12.
- Thayer, Bradley A. & Lianchao Han. "China's Coronavirus Plan: Create Silk Road of Health Care Leading Towards World Dominance", *The National Interest*, 19 Maret 2020.
- Van de Ven, Johan. "Limited Payoffs: What Have BRI Investments Delivered for China Amid the Coronavirus Outbreak?", *China Brief*, Vol. 20, Issue 5, 16 Maret 2020.
- Wang, Yao. et al. "The intentions, needs, advantages and barriers: a survey of twenty-nine countries participating in the "Belt and Road Initiative" health cooperation", *Global Health Research and Policy*, Vol. 4, No. 4, 2019.

Yuen, Kwok-Yung. "The Belt and Road Initiative: Challenges and opportunities in tackling emerging infectious diseases", *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 11(10 suppl): 13, 2018.

Zhou, Weifeng & Mario Esteban. Beyond Balancing: China's Approach towards the Belt and Road Initiative, *Journal of Contemporary China*, 27: 112, 2018.



Humphrey Wangke
humphrey.wangke@dpr.go.id

Dr. Humphrey Wangke, M.Si. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada tahun 2018 menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Beberapa Karya tulis yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim (2018)", "Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan (2017)", "Solving the Problem of Illegal Logging through the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, East Kalimantan (2017)", "The Management of Kutai National Park through the Multi-stakeholder Partnership (2017)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.